

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.3053](https://doi.org/10.36859/JP.V2I1.3053)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 06 Desember 2024 Accepted : 13 Februari 2024 Published : 14 Februari 2025

IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA PADA KASUS STUNTING DI DESA CIHANJUANG KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Regina Wulandari Al-Septi¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Siti Munawaroh³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah program *Sustainable Development Goals (SDGs)* sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya untuk penanganan *stunting* di Desa Cihanjuang ini, serta berfokus pada permasalahan *stunting* dan apa saja program yang dibuat untuk penanganan *stunting* yang juga ditujukan untuk mendukung tercapainya tujuan dari program *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 9 informan terpilih untuk melengkapi data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana peneliti memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada kasus *stunting* di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ini belum sepenuhnya optimal. Dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, skor *SDGs* belum mencapai target yang mereka tetapkan. Sumber daya manusia dan infrastruktur yang siap mendukung percepatan penurunan *stunting* tetapi dari segi dana/anggaran belum dialokasikan secara proposional dalam penanganan *stunting* ini. Dari segi lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga belum sepenuhnya optimal karena belum ada kebijakan yang efektif yang secara khusus dibuat oleh Pemerintah Desa Cihanjuang untuk percepatan penanganan *stunting*.

Kata Kunci: *Implementasi Program, Sustainable Development Goals, Stunting.*

Abstract

The problem raised in this research is whether the Sustainable Development Goals (SDGs) program has been implemented in accordance with applicable regulations, especially for handling stunting in Cihanjuang Village, as well as focusing on the problem of stunting and what programs

have been created to overcome it. with stunting which also aims to support the achievement of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs) program. This research uses qualitative research methods, data was collected through in- depth interviews with 9 selected informants to complete the data in the research. Data collection techniques through literature study, observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis where researchers utilize qualitative data and explain it descriptively. The research results show that the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) program in stunting cases in Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency is not completely optimal. Judging from the size and policy objectives, the SDGs score has not yet reached the target they set. Human resources and infrastructure are ready to support the acceleration of stunting reduction, but in terms of funds/budget, they have not been allocated proportionally in handling stunting. In terms of the economic, social and political environment, it is also not yet fully optimal because there are no effective policies specifically created by the Cihanjuang Village Government to accelerate the handling of stunting.

Keywords: **Program Implementation, Sustainable Development Goals, Stunting.**

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan (Bappenas, 2023). Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Stunting adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan gizi yang menjadi perhatian dunia. Stunting juga termasuk ke dalam salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yakni menghilangkan segala bentuk

kelaparan atau malnutrisi salah satunya dapat diwujudkan melalui peningkatan ketahanan pangan. *Stunting* merupakan permasalahan utama gizi yang akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi Masyarakat. Penanganan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung dengan didukung oleh koordinasi dan Kerjasama dalam berbagai sektor yang ada pada seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai Pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tentunya memiliki potensi untuk melakukan penanganan stunting, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Prevalensi stunting di Kabupaten Bandung Barat menempati urutan ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2022. Presentase stunting Bandung Barat mencapai 27,3%, angka prevalensi ini terpaut tipis dari dua Kabupaten lain yakni Sukabumi dengan presentase 27,5% dan Kabupaten Sumedang diurutkan teratas dengan prevalensi 27,6%. Berdasarkan rekap data *stunting* Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat tahun 2023, stunting di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong berjumlah 124 anak.

Permasalahan *stunting* ini sendiri bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Desa Cihanjuang saja, namun tentunya perlu adanya sinergi, bantuan dan usaha dari seluruh pihak dan lembaga lainnya. Pemerintah Desa Cihanjuang telah melakukan berbagai macam kegiatan guna memaksimalkan upaya penurunan *stunting*, namun tentunya seluruh kegiatan tidak akan mampu berjalan secara optimal apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari seluruh elemen di Desa Cihanjuang. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, maka Pemerintah Desa Cihanjuang membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) agar

permasalahan *stunting* dapat terintegrasi dengan baik. Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa pada Kasus *Stunting* di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Alasan peneliti memilih Desa Cihanjuang karena ingin mengetahui apa penyebab tingginya angka *stunting* di Desa Cihanjuang yang merupakan sebuah desa mandiri. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa pada Kasus Stunting di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat**”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yang dimana menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2017:126), ia mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan”. Berdasarkan pengertian yang diuraikan diatas, Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2017: 133-136) bahwa ada enam variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Dari keenam variabel tersebut, peneliti mengambil tiga variabel

yang menurut peneliti sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan disesuaikan dengan gejala-gejala yang ada di lapangan setelah peneliti melakukan penjajakan awal sebagaimana harusnya dalam implementasi program agar tujuan dari program dapat tercapai. Ketiga variabel tersebut adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa ketiga variabel implementasi tersebut dapat diterapkan, khususnya dapat diterapkan pada implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa pada Kasus *Stunting* di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung yang proses penerapannya harus melibatkan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat berdampak pada pencapaian yang dikehendaki.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok (Creswell, 2019). Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi untuk dapat mengetahui secara langsung sebuah fakta terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dalam pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Selain melalui pengamatan, untuk mendukung dan memperkuat hasil data-data yang telah didapatkan, peneliti juga menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data-data

informasi yang benar dan akurat serta menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan.

PEMBAHASAN

Balita pendek atau *stunting* merupakan kondisi dimana seorang anak atau balita memiliki tinggi badan atau panjang badan yang kurang dari balita normal di usianya, *stunting* ini sendiri merupakan suatu gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diteima oleh anak dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan standar mengenai antropometri penilaian gizi anak yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 yakni status gizi terhadap anak pendek atau *stunting* didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan ukuran kurang dari -2 SD (standar deviasi).

Menangani permasalahan *stunting* ini tentunya bukanlah perkara yang mudah, karena juga perlu memiliki faktor penyebabnya pula, *stunting* ini tentunya tidak akan terjadi begitu saja tanpa penyebab yang jelas, ada banyak faktor yang menyebabkan *stunting* ini terjadi, seperti dari sektor ekonomi, kesehatan, serta lingkungan pun berpengaruh dalam kasus *stunting* ini. Masih banyaknya masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah sehingga konsumsi makanan yang bergizi masyarakat pun juga turut rendah, sedangkan bagi ibu hamil dan balita konsumsi makanan yang bergizi cukup sangatlah penting, belum lagi infrastruktur daerahnya yang apabila infrastrukturnya tidak layak akan mempengaruhi akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan secara cepat. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat merupakan kabupaten yang pada akhir tahun 2020 pernah berada di kisaran angka prevalensi *stunting* yang cukup tinggi yakni 37,94%, angka tersebut tergolong dalam jumlah yang cukup tinggi jauh di atas rata-rata taraf

nasional ataupun skala Provinsi Jawa Barat. Tingginya angka indikator *stunting* tersebut pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya kondisi permasalahan balita pendek atau *stunting* saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih lagi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak. Tingginya angka indikator *stunting* tersebut pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya kondisi permasalahan balita pendek atau *stunting* saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih lagi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) anak, didasari oleh hal itulah *stunting* saat ini menjadi perhatian utama.

Pencapaian upaya pembangunan berkelanjutan telah tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang di dalamnya terdapat 3 pilar yakni pilar sosial, pilar ekonomi dan juga pilar lingkungan, 3 pilar tersebut tentunya saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Dalam menjelaskan implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada kasus *Stunting* di Desa Cihanjuang, peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan yang kemudian dikemukakan dalam pembahasan pada sub bagian di bawah ini:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistik dengan sosio-kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. SDGs telah menetapkan beberapa target ataupun indikator yang harus dicapai pada tahun 2030, mengenai penanggulangan *stunting* sendiri diharapkan mampu turun sebanyak 40% pada tahun 2025 dan adanya ketahanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga turut berupaya untuk menurunkan jumlah *stunting* sebanyak 2,2% pada tahun 2024.

Pemerintah Desa Cihanjuang sudah membentuk Tim yang bernama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Sejalan dengan arahan Bupati Bandung Barat tentang pembentukan

TPPS yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Barat No. 53 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, maka Pemerintah Desa Cihanjuang membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cihanjuang nomor 25/SK.Kep/III/2022. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa Cihanjuang ini di bentuk pada tanggal 27 Januari 2022 khusus untuk mempermudah memberikan kelancaran bagi para lembaga yang melaksanakan tugas program penurunan *stunting* ini, TPPS ini diketuai langsung oleh Ketua TP PKK yakni Ibu Nia Kusmiati yang ditunjuk dan ditugasi langsung oleh Kepala Desa Cihanjuang. Upaya-upaya penanganan *stunting* yang dibuat oleh Pemerintah Desa Cihanjuang tentunya untuk mendukung terlaksananya implementasi SDGs. Upaya akselerasi perbaikan gizi secara fundamental merupakan bagian dari SDGs Desa tujuang ke-2 yaitu memutus rantai kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan memberikan akses untuk perolehan nutrisi yang lebih mumpuni dan mendukung ragam aktivitas pertanian secara berkelanjutan. Desa Cihanjuang ini ukuran dan tujuan kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan program-program atau kebijakan yang sedang dijalankan. Pemerintah Desa Cihajuang memberikan perhatian sepenuhnya kepada kasus *stunting* ini dilihat dari berbagai langkah konkret yang telah diambil oleh Pemerintah Desa Cihanjuang seperti melakukan rembuk *stunting* untuk kemudian memberi penyuluhan kepada 4 unsur dalam *stunting* ini yang merupakan cakupan balita, ibu hamil, pelayanan terhadap masyarakat seperti remaja putri dan calon pengantin.

Desa Cihanjuang ini sebenarnya belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah sebagai Desa dengan angka *stunting* tertinggi kedua di Kabupaten Bandung Barat, karena untuk mengatasi *stunting* ini tentunya harus dilakukan dengan optimal. Maka dari itu dibuatlah lokus atau lokasi fokus yang dimana Desa Cihanjuang ini baru mendapat lokus *stunting* di

tahun 2025 karena untuk menentukan lokus harus dilakukan pendataan terlebih dahulu dan pendataan tersebut dilakukan dua tahun sebelum lokus ditentukan. Seperti Desa Cihanjuang yang mendapat lokus di tahun 2025 karena pendataan dilakukan di tahun 2023.

Sumber Daya

Sumber daya ini merupakan elemen yang penting dalam proses implementasi suatu kebijakan, keberhasilan dari suatu kebijakan pun dapat diukur dari kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya infrastruktur yang digunakan.

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia di Desa Cihanjuang ini termasuk yang sudah siap dalam mendukung implementasi program SDGs Desa terutama pada kasus *stunting* ini. sumber daya manusia yang ada di Desa Cihanjuang ini sudah sangat mendukung terkait program-program yang dibuat untuk menangani kasus *stunting* yang ada. Para kader posyandu yang selalu sigap dalam berbagai kegiatan terkait *stunting*. Mereka juga beberapa kali mendapatkan penyuluhan terkait *stunting* yang kemudian disebarluaskan melalui posyandu. Para kader posyandu ini juga melakukan pendataan tentang tinggi badan anak yang kemudian data tersebut dilaporkan kepada Dinas Kesehatan.

Dalam pelaksanaan suatu program kegiatan atau suatu kebijakan maka tidak akan jauh dari permasalahan penganggaran dana yang juga menunjang keberlangsungan program serta capaiannya, apabila tidak tercukupinya dana dan penganggaran suatu program maka tentu saja program tersebut tidak akan mampu terlaksana secara keseluruhan. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, sedangkan

aliran dana melalui anggaran tidak tersedia maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Aep Gojali, ST selaku Sekretaris Desa Cihanjuang, anggaran untuk penanggulangan *stunting* yakni:

Gambar 1 Data Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pencegahan *Stunting* Desa Cihanjuang

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMERINTAH DESA CIHANJUANG KECAMATAN PARONGPONG TAHUN ANGGARAN 2024						
Jenis APBDes :						
		URAIAN			ANGGARAN	
1	2	3	4	5	VOLUME	HARGA SATUAN
6.	BELANJA					
2.02.91	01 Penyuluhan dan Penanganan Stunting					13.055.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan					13.055.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	DDS	30 Buah	7.000,00	210.000,00	
	01. Note Bok	DDS	3 Pack	40.000,00	120.000,00	
	02. Balpon	DDS	2 Rim	45.000,00	90.000,00	
	03. Kertas HVS A4	DDS			185.000,00	
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
	01. Cetak Photocopy	DDS	37 Paket	5.000,00	185.000,00	
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					
	01. Nasi Dus	DDS	30 Dus	25.000,00	750.000,00	
	02. Snack	DDS	30 Dus	15.000,00	450.000,00	
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk					
	01. Cetak Spanduk	DDS	1 Buah	150.000,00	150.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium					11.100.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
	01. Ketua	DDS	1 org	250.000,00	250.000,00	
	02. Sekretaris	DDS	1 Org	200.000,00	200.000,00	
	03. Anggota	DDS	1 Org	150.000,00	150.000,00	
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Harasumber					
	01. Harasumber	DDS	3 ej	1.000.000,00	3.000.000,00	
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas					
	01. Honor KPM	DDS	12 Bulan	500.000,00	6.000.000,00	
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis					
	01. Uang Saku Peserta Pelatihan	DDS	30 org	50.000,00	1.500.000,00	
JUMLAH (Rp)						13.055.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		28 August 2024 Pelaksana Kegiatan Anggaran,		
GAGAN WIRAHMA,S.IP		AEP GOJALI,ST		Diawati		

Sumber: Pemerintah Desa Cihanjuang

Gambar Rancangan Anggaran Biaya diatas merupakan klasifikasi penganggaran kegiatan penanggulangan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cihanjuang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting*. Pengalokasian anggaran ini belum maksimal, kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* di Desa Cihanjuang ini masih berupa penyuluhan-penyuluhan, untuk program seperti PMT (Pemberian Makanan Tambahan) itu belum dianggarkan karena masih menerima bantuan dari provinsi.

Infrastruktur merupakan kerangka kerja atau fondasi yang mendukung pemerintah desa yang dalam hal ini untuk mengatasi *stunting*. Infrastruktur disini mendukung Pemerintah Desa Cihanjuang dalam program percepatan penurunan *stunting*. Infrastruktur disini berupa fasilitas kesehatan yang tersedia dan peningkatan sanitasi dan air bersih. Hal ini dibilang sudah cukup memadai dalam mendukung upaya pencegahan *stunting*.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwasannya dalam menilai kinerja implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari sejauhmana lingkungan eksternal juga turut serta dalam mencapai keberhasilan lingkungan, sosial dan juga ekonomi. Dalam permasalahan *stunting* di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat tentunya akan memiliki dampak yang bersar terhadap lingkungan masyarakat, karena seperti lingkungan mempengaruhi perilaku dan juga sikap masyarakat, dalam lingkar *stunting* ini sendiri lingkungan masyarakat yang tidak bersih tentunya akan semakin menambah tinggi jumlah penderita *stunting*.

Lingkungan yang tidak sehat akan berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu hamil, apabila kondisi ibu hamil tidak sehat pastinya nanti akan berpengaruh pada kondisi bayinya. Maka dari itulah lingkungan sangat mempengaruhi proses kesehatan dan proses implementasi kebijakan, lingkungan yang jauh dari teknologi maka kemampuan dan juga pengetahuan masyarakatnya pun akan kurang. Tidak hanya faktor lingkungan, faktor ekonomi pun memiliki pengaruh yang cukup besar pula karena berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terkadang masyarakat masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mereka berada di taraf perekonomian yang rendah. Apabila penghasilan masyarakat rendah pastinya masyarakat akan kesulitan untuk

mendapatkan makanan yang sehat dan juga bergizi.

Lingkungan politik yang kondusif sangat penting untuk keberhasilan implementasi program SDGs pada kasus *stunting* ini. Selain itu, kebijakan untuk mempercepat pencegahan *stunting* ini juga sangat dibutuhkan karena pembuatan kebijakan merupakan fondasi yang sangat penting dalam keberhasilan suatu program, termasuk program penanganan *stunting* di Desa Cihanjuang. Kebijakan yang baik akan memberikan arah yang jelas, mengatur sumber daya secara efektif dan memastikan bahwa semua pihak terkait bekerja sama menuju tujuan yang sama. Pemerintah Desa Cihanjuang ini belum membuat kebijakan yang jelas mengenai *stunting*. Dilihat dari pengalokasian anggaran yang belum optimal untuk pencegahan *stunting*. Pemerintah Desa Cihanjuang harusnya membuat kebijakan yang memfokuskan kepada penanganan *stunting*. Karena dengan membentuk TPPS tanpa ada kebijakan yang mendukung akan sulit untuk mempercepat penurunan angka *stunting* di Desa Cihanjuang ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ditinjau dari ukuran dan tujuan kebijakan dikatakan sudah optimal karena ukuran dan tujuan kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan program- program atau kebijakan yang sedang dijalankan. Pemerintah Desa Cihanjuang membuat kebijakan yang sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan *stunting* ini. Kebijakan yang dibuat salah satunya adalah pembuatan TPPS (Tim Percepatan Penanganan *Stunting*). Implementasi ditinjau dari sumber daya dapat dikatakan belum optimal secara keseluruhan. Sumber daya manusia di Desa Cihanjuang terlihat sudah siap dalam mendukung upaya penanganan *stunting* ini, tetapi sumber daya anggarannya belum begitu diperuntukkan untuk penanganan *stunting* dan implementasi ditinjau dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat dikatakan belum optimal karena masyarakat terutama ibu yang memiliki balita di Desa Cihanjuang itu sebenarnya memiliki kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *stunting*. Para kader posyandu sendiri selalu memberikan informasi terkait *stunting* ini. Tetapi mengenai pola hidup mereka sendiri yang menjadi salah satu tantangan untuk Pemerintah Desa Cihanjuang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nawir, S. J. (2022). Penerapan Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Bappenas. (2023, Desember Minggu). Retrieved from [sdgs.bappenas.go.id: https://sdgs.bappenas.go.id/tentang-3/](https://sdgs.bappenas.go.id/tentang-3/).
- Bayu Pranoto, T. U. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berjalan Menuju SDGs Desa Mandiri dan Berkelaanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12 (2).
- Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Creswell, J. W. (2019). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali. *KAWISTARA*.
- Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Papatung*, 5(2).
- Tanti Nurgiyanti, D. R. (2022). Implementasi Resep Pembangunan Internasional *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata di Desa Wisata Bugisan. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Respati Yogyakarta*, 4(1).
- Usadi, D. (2021). SDG' DESA DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi -SNITek 2021*, (pp. 94-96). Jakarta.